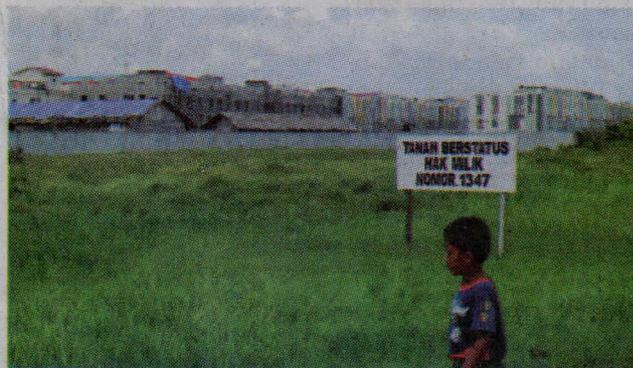


# Pasca WTP

# Perangi Kemiskinan

*DPRD Pontianak memberikan apresiasi yang cukup besar terhadap laporan pertanggungjawaban Walikota Pontianak Sutarmidji di mana pemkot mendapatkan opini yang sangat bagus dari BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini diharapkan dapat terus dipertahankan.*



## KOTA

*Pertumbuhan dan perkembangan Kota Pontianak dapat dilihat dari bagian belakang Ayani Mega Mall. Lahan semakin mahal dan pemilik "wanti-wanti" menandai hak miliknya. Foto diambil pada Selasa (12/6). FOTO Nur Iskandar / Borneo Tribune*

## Rosalinda

Borneo Tribune, Pontianak

KETUA DPRD Kota Pontianak Hartono Azas mengatakan realisasi anggaran Pemkot melebihi target. Selain itu pemkot juga mendapatkan predikat WTP. Ini perlu dipertahankan sekaligus ada pula kekurangan yang masih harus diperbaiki.

"Saya berharap lebihnya target ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat di bidang peekonomian," harap Azas.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN

## Pasca WTP Perangi Kemiskinan

Sementara Ketua Komisi A DPR Pontianak M. Fauzie juga memberikan apresiasi karena pemkot mendapatkan predikat WTP. Namun ada beberapa hal yang bersifat catatan yang perlu perbaikan. Salah satunya bagaimana terus mempertahankan predikat WTP itu.

"Kita memang berharap segala sesuatu yang diperoleh dari masyarakat dikembalikan lagi ke masyarakat dalam arti luas. Jangan pada wilayah-wilayah tertentu saja sehingga tidak terjadi pemerataan pembangunan," kata Fauzie.

Misalnya kue pembangunan ini lebih banyak di wilayah tertentu perlu, tapi perlu juga digiring di wilayah Utara dan Timur sehingga tingkat kepuasan masyarakat menyeluruh di Kota Pontianak. Untuk melakukan pembangunan perlu peran Bapadda

supaya pembangunan infrastruktur nampak, begitu juga dengan pembangunannya.

"Saya melihat pembagunan itu belum merata karena Timur dan Utara belum tersentuh seutuhnya, atau dapat dikatakan setengah hati," jelas Fauzie.

Contohnya jalan Parwasal masih ada 60 meter yang belum selesai. Seharusnya ini berkelanjutan. Juga lapangan sepak bola yang tidak dianggarkan. Dus, masih banyak lagi jalan yang belum selesai dikerjakan, sehingga masyarakat membuat opini sendiri di mana kue pembagunan yang dilakukan pemerintah Pontianak kurang adil. "Dengan adanya predikat WTP harus memuat masyarakat sehingga ada pemerataan."

Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Pontianak

Mansyur mengakui sebagai Ketua Komisi D sampai saat ini belum menemukan hal-hal yang tak wajar dari kinerja pemerintah kota Pontianak. "Mereka sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan mekanismenya yang berlaku."

Ke depannya Pemkot harus berupaya secara maksimal bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama dalam mengatasi kemiskinan.

Selain itu dia juga berharap apa yang diprogramkan masing-masing SKPD yang berkaitan dengan kemiskinan dapat saling bersenergi. Artinya setiap sistem yang dijalankan saling berkesinambungan. Paling tidak ada program-program yang tepat sasaran sehingga program kemiskinan diprioritaskan sehingga angka kemiskinan di Pontianak berkurang.